



INOVASI PEMERINTAH

Gatra Matra Jogja Sabet Penghargaan Bhumandala Award 2023

Inovasi pelayanan milik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Jogja, *Capura Aksesibilitas Terintegrasi Pemanfaatan Tata Ruang Kota Jogja* atau *Gatra Matra Jogja*, menyabet penghargaan Bhumandala Award 2023. Penghargaan diserahkan kepada Pemkot Jogja di Bali pada Senin (6/11).

Kepala Dispertaru Kota Jogja, Wahyu Handoyo menuturkan *Gatra Matra Jogja* menggabungkan antara peta dan data menjadi sebuah sistem. Wilayah kemitraan, kelurahan, RT, RW, hingga peta jalan sudah terdigitalisasi. Selanjutnya, data ini menjadi sumber informasi berkaitan dengan tata ruang yang ada di Kota Jogja dan bisa diakses oleh masyarakat.

Beberapa informasi di dalamnya

di antaranya terkait dengan tata ruang yang dimanfaatkan untuk permukiman, pedagang dan jasa, sarana pelayanan umum, dan sebagainya. Selain itu, ada juga informasi lainnya seperti ketinggian bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, hingga koefisien dasar hijau.

Wahyu mengatakan sebelumnya akses informasi hanya bisa dilakukan secara formal melalui perizinan *online*. Namun, dengan adanya inovasi ini masyarakat tidak perlu melewati jalur prosedural. "Inovasi ini membantu ketika kemanafaatannya disegerakan. Sebelum melakukan perencanaan konstruksi, masyarakat hanya ingin sekadar mengetahui dulu

tanpa melalui prosedur yang rumit sehingga bisa langsung diakses," ujar Wahyu saat ditemui di Balai Kota Jogja, Rabu (8/11).

Melalui inovasi *Gatra Matra Jogja*, diharapkan dapat mempercepat masyarakat dalam mengakses informasi, sekaligus bisa membuat masyarakat lebih familiar terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Sehingga yang dibutuhkan masyarakat bisa tersaji dengan mudah, bisa merencanakan, bisa untuk investasi ataupun *appraisal*," katanya.

Meski masyarakat bisa mengakses sejumlah informasi melalui *Gatra*

Matra Jogja, ada beberapa informasi yang tak bisa disajikan, salah satunya terkait dengan kepemilikan lahan. Menurut Wahyu, data kepemilikan tanah menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo menyebut inovasi ini merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sudah sepatutnya masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses informasi yang transparan dan akuntabel. "Terbukanya akses informasi mengenai ketentuan tata ruang akan berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan tata ruang sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Singgih. (AM/Annissa Karin/*)



Kepala Dispertaru Kota Jogja, Wahyu Handoyo (kiri) bersama Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo (kanan), menunjukkan penghargaan Bhumandala Award 2023 di Bali, Senin (6/11). Istimewa/Dokumentasi Pemkot Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005